

**PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS PERJANJIAN PINJAM
NAMA TERKAIT KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI
INDONESIA**

Nama : Carrissa Shannon Lie

Jurusan : Hukum

Pembimbing : Sriwati, S.H., M.Hum.

Erly Aristo, S.H., M.Kn.

Abstrak- Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria mengatur berbagai jenis hak atas tanah, salah satunya Hak Milik. Hak Milik diartikan sebagai hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh. Namun, adanya pembatasan terkait kepemilikan Hak Milik di Indonesia membuat beberapa pihak tidak dapat memperoleh tanah berstatus Hak Milik. Karena itu, mereka menggunakan Perjanjian Pinjam Nama yang secara tidak langsung dapat membantu mereka memperoleh tanah berstatus Hak Milik. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis keabsahan dari Sertipikat Hak Atas Tanah yang diterbitkan atas tanah yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Pinjam Nama, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan juga konsep-konsep hukum administrasi. Jika meninjau dari undang-undang dan konsep hukum administrasi yang ada, Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan atas tanah yang diperoleh dengan Perjanjian Pinjam Nama adalah keputusan yang batal.

Kata Kunci : Perjanjian Pinjam Nama, Sertipikat Hak Milik, Hak Milik

**ADMINISTRATIVE SANCTION FOR NOMINEE AGREEMENT
RELATED TO LAND RIGHTS IN INDONESIA**

Name : Carrissa Shannon Lie
Diciple/Study Programme : Law
Contributor : Sriwati, S.H., M.Hum.
Erly Aristo, S.H., M.Kn.

Abstract- Article 16 The Basic Agrarian Law regulates various types of land rights, one of which is Property Rights. Property rights are defined as rights that are hereditary, strongest and most fulfilled. However, the existence of restrictions related to the ownership of Property Rights in Indonesia has prevented some parties from acquiring land with the status of Property Rights. Therefore, they use the Nominee Agreement which can indirectly help them obtain ownership rights. This study is intended to analyze the validity of the Certificate of Land Rights issued on land obtained under the Nominee Agreement, in terms of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration and also the concepts of administrative law. If the review of existing laws and administrative legal concepts, the Certificate of Property Ownership issued on land obtained with the Nominee Agreement is null.

Keywords : Nominee Agreement, Freehold Title, Property Rights